

## PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PENYELENGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (USULAN: DINAS PERIJINAN)

Sri Agustina Rumapea<sup>1</sup>, Kridanto Surendro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Informatika, Bidang Khusus Sistem Informasi, Program Studi Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung

<sup>2</sup>Information System Research Group, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI),

Institut Teknologi Bandung, Jln. Ganesha 10 Bandung

e-mail: <sup>1</sup>sri\_rumapea@yahoo.com, <sup>2</sup>endro@informatika.org

### ABSTRAKSI

Perkembangan teknologi dan sistem informasi di Indonesia saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh dunia industri tetapi juga dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan perannya menjalankan pemerintahan. Tetapi sayang fenomena yang terjadi adalah investasi yang besar di bidang TI dan SI seringkali tidak dibarengi dengan manfaat yang diperoleh oleh pemerintah (enterprise). Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sistem informasi dilakukan tanpa membuat cetak biru enterprise terlebih dahulu sebagai landasan bagi pengembangan sistem informasi. Sehingga dengan perkembangan enterprise yang semakin kompleks mengharuskan enterprise tersebut melakukan kustomisasi terus-menerus terhadap sistem informasi yang telah dibangun yang tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Duplikasi sistem informasi, tidak adanya integrasi sistem informasi yang satu dengan yang lain, platform yang berbeda antar tiap sistem informasi juga menjadi faktor penyebab kegagalan suatu enterprise mendapatkan manfaat yang optimal dari penggunaan TI dan SI.

Suatu enterprise yang tumbuh dan menjadi lebih kompleks membuat management melakukan permintaan yang semakin besar terhadap fungsi sistem informasi. Mereka membutuhkan untuk dapat melakukan akses terhadap data kapanpun dan dimanapun dengan mudah, akurat dan konsisten di seluruh departemen, sistem informasi yang cepat mengikuti perubahan kondisi bisnis, dan dapat melakukan sharing data antar tiap departemen. Karena itu suatu cetak biru dari enterprise menjadi hal yang sangat penting untuk dibangun sebagai landasan dalam memanfaatkan IT dan SI yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis enterprise dengan menghasilkan informasi yang berkualitas. Kualitas ini harus direncanakan.

Perencanaan Arsitektur Enterprise merupakan pendekatan yang modern untuk melakukan perencanaan terhadap kualitas data dan mencapai misi SI dan merupakan proses dalam mendefinisikan sejumlah arsitektur untuk menggunakan informasi dalam mendukung bisnis dan rencana untuk mengimplementasikan arsitektur tersebut. Dari definisi diatas ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Arsitektur Enterprise adalah, yang pertama adalah sejumlah arsitektur yang ditetapkan adalah arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Arsitektur dalam konteks ini adalah sebuah cetak biru, gambaran ataupun model.

Enterprise dalam penelitian ini adalah penyelenggara pelayanan perijinan satu pintu. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Perubahan sistem penyelenggaraan membutuhkan proses penyesuaian diantaranya adalah pembentukan organisasi, proses bisnis, perumusan peraturan daerah, perancangan infrastruktur dan teknologi informasi, perancangan sistem informasi, dan pembentukan unit dan fasilitas organisasi. Pengembangan sistem informasi diharapkan dapat menjadi alat yang dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Penyelenggaraan PTSP.

Cetak biru yang dihasilkan dengan Perencanaan Arsitektur Enterprise selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi sehingga diharapkan Sistem Informasi yang dibangun dapat align, support dan fit dengan enterprise yang dalam hal ini adalah Dinas Perijinan sebagai penyelenggara PTSP.

**Kata kunci:** Perencanaan Arsitektur Enterprise, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Teknologi, Cetak Biru, Sistem Informasi

### 1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat [8]. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perbaikan terhadap model

Pelayanan Satu Atap yang sebelumnya dilaksanakan.

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Permendagri No.24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk melakukan percepatan pelayanan perijinan dengan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan

ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Jangka waktu ini diharapkan bisa menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pelayanan perijinan seperti yang telah dilakukan di beberapa kabupaten dan kotamadya yang ada di Indonesia.

Paradigma pelayanan perijinan merupakan suatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena:

- secara struktural memang telah ada deregulasinya “Permendagri” tersebut yang mengisyaratkan sebagai suatu instruksi atau suatu penetapan yang harus dilaksanakan.
- bahwa adanya kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan perijinan yang lebih cepat, murah dan mudah diakses tanpa menimbulkan akses bagi pemakai pelayanan.
- bahwa ada aspek koordinasi, dimana sudah saatnya memberikan pelayanan prima, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definsisi arsitektur

Berikut ini adalah beberapa definisi atau pemahaman mengenai arsitektur:

1. Arsitektur adalah organisasi fundamental dari sistem yang diwujudkan dengan komponen-komponennya, keterhubungannya satu sama lain dan terhadap lingkungannya, dan prinsip sebagai pedoman rancangan dan evolusinya (IEEE 1471 – 2000).
2. Arsitektur adalah rancangan dari segala jenis struktur, baik fisik maupun konseptual, baik nyata maupun maya [1].
3. Arsitektur adalah struktur dari komponen dimana masing-masing komponen saling berelasi dan prinsip dan panduan dalam merancang yang selalu berevolusi setiap saat [3].

Dari definisi yang disebutkan diatas dapat memberikan gambaran bahwa ”arsitektur” merupakan suatu rancangan berupa cetak biru yang akan dijadikan dasar untuk mewujudkan suatu karya nyata.

Sedangkan definisi dari *enterprise* adalah suatu informasi strategis berdasarkan aset yang mendefinisikan misi, kebutuhan informasi untuk melakukan misi, dan proses peralihan untuk mengimplementasikan teknologi baru dalam merespon kebutuhan perubahan misi. Arsitektur *enterprise* meliputi gambaran dasar arsitektur, arsitektur target dan rencana berkelanjutan. [12]

### 2.2 Enterprise Architecture

Secara umum alasan yang esensial untuk mengembangkan EA meliputi:

- a. Selaras – memastikan bahwa arsitektur *enterprise* yang bangun sesuai dengan kebutuhan manajemen
- b. Integrasi – menyadari bahwa aturan bisnis konsisten terhadap organisasi, data dan penggunaanya tetap, antar muka dan aliran informasi memenuhi standar, koneksi dan kemampuan operasi dikelola secara tepat oleh *enterprise*.
- c. Perubahan - memfasilitasi dan mengelola perubahan setiap aspek dari *enterprise*.
- d. Waktu pemasaran – mengurangi pembangunan sistem, generasi aplikasi, dan kebutuhan sumber daya.
- e. Convergence – berusaha untuk menghasilkan portofolio produk IT yang standar seperti yang termasuk di dalam Technical Reference Model (TRM).

### 2.3 Perencanaan Arsitektur Enterprise (PAE)

Perencanaan Arsitektur Enterprise merupakan pendekatan yang modern untuk melakukan perencanaan terhadap kualitas data dan mencapai misi SI dan proses yang dilakukan untuk mendefinisikan sejumlah arsitektur dalam menggunakan informasi untuk mendukung bisnis dan rencana implementasikan arsitektur tersebut [12].

Dari definisi diatas ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam PAE adalah, yang pertama adalah sejumlah arsitektur yang ditetapkan adalah arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur teknologi. Arsitektur dalam konteks ini adalah sebuah cetak biru, gambaran ataupun model. Didalam PAE arsitektur menjelaskan data, aplikasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis. Hal penting yang ke dua adalah PAE menetapkan bisnis dan mendefinisikan sejumlah arsitektur. PAE menetapkan dan tidak merancang, PAE tidak merancang sistem, merancang basis data ataupun jaringan. Pekerjaan merancang dan mengimplementasikan dimulai setelah proses menetapkan PAE telah selesai. Dan yang terakhir adalah bahwa sejumlah arsitektur menetapkan apa yang dibutuhkan, dan mendukung rencana untuk menetapkan kapan arsitektur yang telah dibangun tersebut diimplementasikan [12].

### 2.4 Kerangka Kerja Zahman

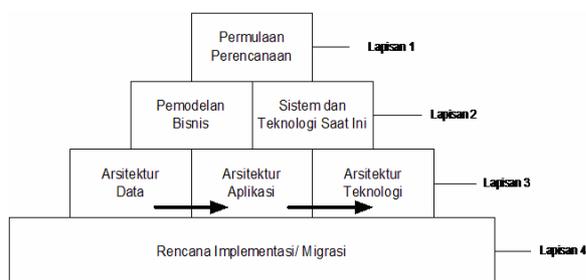
Kerangka Kerja Zahman (Zahman Framework atau ZF) merupakan suatu skema untuk melakukan klasifikasi dalam pengorganisasian artifak *enterprise* yang diperkenalkan pertama kali oleh Jhon Zahman [1] ZF terdiri dari 6 (enam) kolom dan 5 (lima) baris. Tiap kolom merepresentasikan fokus, abstraksi, atau topik arsitektur *enterprise*, yaitu: data (atau *what*), fungsi (atau *how*), jaringan (atau *where*), manusia (atau *who*), waktu (atau *when*), dan motivasi (atau *why*). Tiap baris merepresentasikan perspektif-perspektif sebagai berikut:

- a. Perspektif Perencana (baris pertama): menetapkan konteks, latar belakang, dan tujuan *enterprise*.
- b. Perspektif Pemilik (baris kedua): menetapkan model-model konseptual dari *enterprise*.
- c. Perspektif Perancang (baris ketiga): menetapkan model-model sistem informasi sekaligus menjembatani dan memerantarai hal-hal yang diinginkan pemilik dan hal-hal yang dapat direalisasikan secara teknis dan fisik.
- d. Perspektif Pembangun (baris keempat): menetapkan rancangan teknis dan fisik yang digunakan dalam mengawasi implementasi teknis dan fisik.
- e. Perspektif Subkontraktor (baris kelima): menetapkan peran dan rujukan bagi pihak bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan secara teknis dan fisik serta mengadakan komponen-komponen yang diperlukan.
- f. Perspektif *Functioning Enterprise* (baris keenam): merepresentasikan perspektif pengguna dan wujud nyata hasil implementasi.

Pertemuan antara baris dan kolom adalah sel, yang terdiri dari artifak-artifak *enterprise* sesuai dengan definisi baris dan kolomnya.

## 2.5 Komponen Metodologi Perencanaan Arsitektur Enterprise

Kerangka kerja Zachman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak menjelaskan bagaimana mendefinisikan dan mengimplementasikan arsitektur yang ada di dalamnya. Sehubungan dengan itu, PAE memiliki tujuh komponen utama yang menunjukkan bagaimana menentukan dan merencanakan implementasi arsitektur SI. Tujuh komponen utama ini dapat dikelompokkan menjadi empat lapisan. Gambar berikut mengilustrasikan ketujuh komponen dan empat lapisan dalam PAE (9).



Gambar 1. Komponen dan lapisan PAE

1. Lapisan 1 ( Di mana kita memulai)
  - Inisiasi perencanaan: Memulai PAE pada jalur yang tepat (termasuk: menentukan metodologi yang digunakan, siapa saja yang akan terlibat, *toolset* yang dibutuhkan). Pada tahap ini akan dihasilkan rencana kerja, kepastian komitmen manajemen.

2. Lapisan 2 (Di mana kita sekarang)
  - Pemodelan bisnis: mengumpulkan pengetahuan mengenai bisnis dan informasi yang digunakan dalam melangsungkan bisnis.
  - Sistem dan teknologi saat ini: mendefinisikan apa yang ada di tempat saat ini untuk sistem aplikasi dan mendukung platform teknologi. Hasilnya adalah sebuah rekapitulasi inventaris dari sistem aplikasi, data, dan teknologi platform sebagai dasar untuk rencana migrasi jangka panjang
3. Lapisan 3 (Di mana kita ingin berada di masa yang akan datang)
  - Arsitektur data: mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis.
  - Arsitektur aplikasi: mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis.
  - Arsitektur teknologi: mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu lingkungan bagi aplikasi yang mengelola data dan mendukung fungsi bisnis
  - Dari arah panah yang terdapat pada gambar 1 diartikan bahwa arsitektur data didefinisikan lebih dulu, dilanjutkan dengan arsitektur aplikasi dan yang terakhir adalah arsitektur teknologi.
4. Lapisan 4 (Bagaimana kita mencapainya)
  - Rencana implementasi/migrasi: menentukan tahapan untuk mengimplementasikan aplikasi, jadwal implementasi, biaya/keuntungan analisa dan mengajukan jalur yang jelas untuk bermigrasi dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa yang akan datang.

## 3. PERENCANAAN ARSITEKTUR ENTERPRISE PPTSP

### 3.1 Model Bisnis

Tujuan dari model bisnis untuk EAP adalah untuk membangun pemahaman akan enterprise yang akan memungkinkan pembangunan arsitektu dan perencanaan yang baik. Dalam satu enterprise ada bagian yang kompleks yang membutuhkan informasi yang lebih banyak dibanding dengan yang lain agar dapat dipahami.

Perangkat daerah sebagai penyelenggara PTSP berdasarkan Pedoman PPTSP dapat berbentuk Dinas, Kantor ataupun Unit. Pembentukan Organisasi ini berdasarkan pada pertimbangan:

- a. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;
- b. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;
- c. kemampuan keuangan Daerah;

- d. ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga

Pada penelitian ini diambil asumsi bahwa penyelenggara PTSP berbentuk Dinas karena memiliki tingkat kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kantor maupun unit.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai struktur organisasi dimana Perangkat daerah kabupaten/kota berbentuk Dinas (PP No 8) terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 4 (empat) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian, dan Bidang terdiri dari 2 (dua) Seksi. Dengan melihat rancangan struktur organisasi [2] dan PP [9] maka diajukan rancangan struktur organisasi seperti pada Gambar 2.

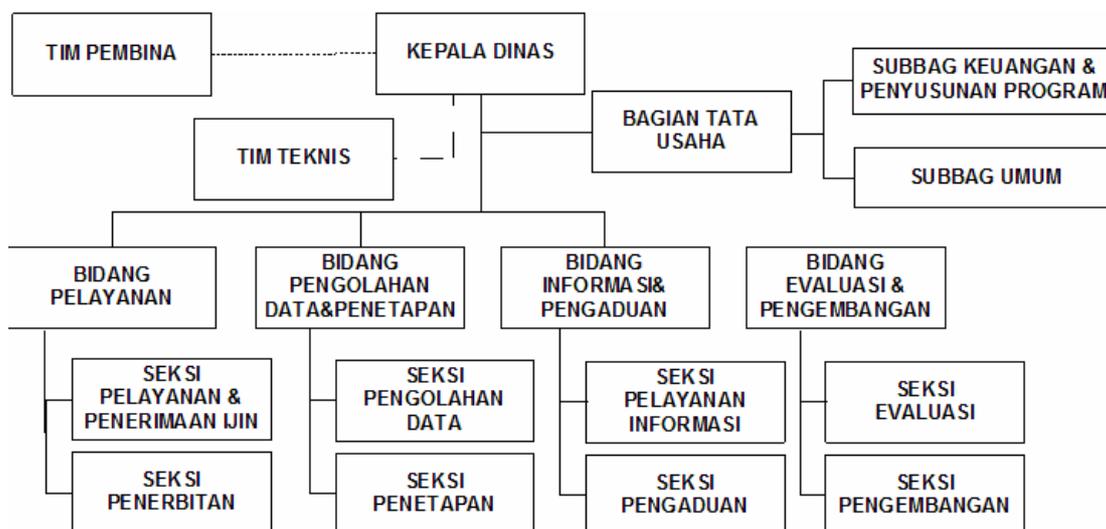
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dari sisi rantai nilai hulu DINAS PERIJINAN adalah konsumen sebagai organisasi yang menerima dan menyelenggarakan peraturan dan kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah yang berupa perangkat peraturan dan perundang-undangan. Dari hulu (penerima dan pelaksana undang-undang) dan hilir (penyelenggaraan pelayanan perijinan), terdapat entitas:

- a. Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan otonomi daerah mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
- b. Dinas yang terkait: Sebelum Bidang Perijinan dibentuk, penyelenggara perijinan dilakukan di masing-masing dinas yang terkait. PPTSP secara berkala menyerahkan laporan mengenai setiap ijin yang telah diterbitkan sehingga

masing-masing dinas yang terkait dapat memiliki informasi terbaru mengenai data ijin yang telah terbit.

- c. Tim Teknis: Saat ini dengan PPTSP, masing-masing dinas mengutus perwakilannya sebagai orang yang ada di dalam Tim Teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan memberikan pertimbangan bagi diterbitkan atau tidaknya permohonan izin.
- d. Tim Pengawasan: Pengawasan dilakukan secara berjenjang maupun secara partisipatif oleh: Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah selain itu pengawasan pengawas juga dilakukan oleh Badan Pengawas daerah kab/kota dan provinsi, Kepala dinas/badan/kantor (fungsi pengawasan internal).
- e. Tim Pembina: Fungsi pembinaan dilakukan secara berjenjang maupun secara partisipatif oleh Menteri dalam negeri dan kepala daerah, sedangkan pembinaan yang bersifat teknis dilakukan oleh kepala dinas yang terkait.
- f. Masyarakat (Pemohon): Masyarakat sebagai konsumen bagi Bidang Perijinan yang mengajukan permohonan izin. Selain itu pemohon ataupun masyarakat pada umumnya dapat melakukan pengaduan pada Dinas Perijinan sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan.
- g. Bank/Kasir: Pembayaran biaya retribusi dilakukan di Bank atau kasir. Pemisahan proses pembayaran dengan loket pelayanan dilakukan untuk menghindari terjadinya.

Analisa rantai nilai *eksternal* mengidentifikasi entitas-entitas bisnis dan juga merangkaikan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya, melalui aliran produk, jasa dan atau informasi yang keseluruhannya memberikan lingkungan eksternal Dinas Perijinan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perijinan

Hasil analisis rantai nilai eksternal membantu untuk mengidentifikasi area-area fungsi yang di dalam rantai nilai Di. Selain itu rantai nilai eksternal selanjutnya dapat digunakan untuk mendefinisikan entitas data dan aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk meningkatkan hubungan kemitraan dan pencapaian keunggulan kompetitif (*good governance*).

Analisis Rantai Nilai Internal Dinas Perijinan  
a. Identifikasi Entitas Bisnis dalam tiap Area Fungsi Rantai nilai internal Dinas Perijinan diidentifikasi dengan menggunakan pengelompokan seperti yang disarankan Porter

Dengan melihat hasil rancangan pembentukan Dinas Perijinan berdasarkan Pedoman pptspp maka tiap-tiap area fungsi utama yang ada di Dinas Perijinan diidentifikasi entitas-entitas bisnis. Penentuan area fungsi utama menggunakan konsep 'value-added' dari Michael Porter. Konsep 'value-added' dari Michael Porter memberikan pengertian pada perumusan jawaban dari pertanyaan bahwa setiap area fungsi utama dari *enterprise* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keseluruhan keuntungan dari perusahaan.

### 3.2 Arsitektur Data

Arsitektur data mengidentifikasi dan menentukan bermacam-macam data utama yang mendukung bisnis enterprise. Layaknya suatu cetak biru, arsitektur data juga dapat berubah seiring spesifikasi perancangan detil untuk implementasi basis data dan aplikasi meningkatkan pemahaman mengenai konsep bisnis fundamental.

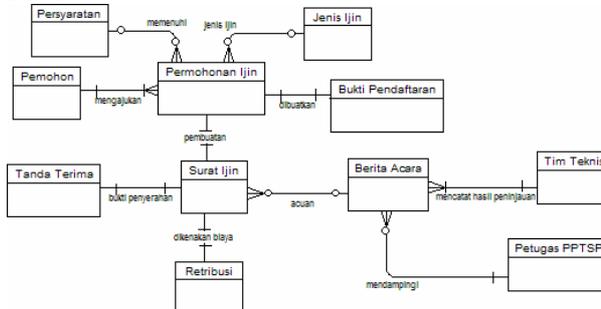
Arsitektur data memberikan tiga manfaat sebagai berikut:

1. Menyediakan kosa kata standar untuk identifikasi, definisi, dan penamaan jenis data utama yang mendukung bisnis
2. Digunakan untuk menetapkan kebutuhan sistem aplikasi yang didefinisikan untuk mengelola sekumpulan entitas data

3. Hubungan antara arsitektur data dan portofolio aplikasi merupakan dasar untuk membuat urutan implementasi aplikasi. [11]

Arsitektur data untuk fungsi bisnis utama

PTSP:



### 3.3 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur aplikasi bukanlah spesifikasi untuk aplikasi tertentu, melainkan deskripsi tingkat tinggi mengenai kemampuan dan manfaat dari semua aplikasi dalam mendukung bisnis. Arsitektur aplikasi juga mengidentifikasi fungsi bisnis yang didukung aplikasi, data yang diciptakan/diperbarui/dibaca aplikasi, dan dampak terhadap aplikasi yang sudah ada.

Layaknya suatu cetak biru, arsitektur aplikasi juga dapat berubah seiring pengembangan spesifikasi perancangan yang lebih detil selama proses implementasi aplikasi-aplikasi yang telah didefinisikan.

Tujuan arsitektur aplikasi adalah mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang akan menyediakan data untuk fungsi bisnis dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Aplikasi-aplikasi tersebut dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan produktifitas atau efektifitas bisnis
2. Menyediakan kelebihan strategis dibandingkan pesaing lain
3. Mengelola data atau melaksanakan fungsi bisnis.

Layanan Umum : Perencanaan Layanan umum, Keuangan, Penelitian, Pengembangan, Absensi, Pegawai				
Sumber Daya Manusia : Pelatihan, Pendidikan, Magang				
Pengembangan Teknologi : Perencanaan Pengembangan TI dan SI				
Pengadaan : Perencanaan Pengadaan, Pemilihan & Realisasi pengadaan, Pengelolaan Kontrak, Disposisi & Pembayaran Pengadaan				
PENGAJUAN PERMOHONAN	PENETAPAN DAN PENGESAHAN	PENETAPAN DAN PENGESAHAN	PENYERAHAN SURAT IJIN	LAYANAN PENGADUAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pendaftaran permohonan</li> <li>Pendaftaran permohonan</li> <li>Pembuatan bukti penerimaan berkas</li> <li>Evaluasi pendaftaran permohonan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan surat ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengesahan surat ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan penyerahan surat ijin</li> <li>Pembayaran biaya retribusi</li> <li>Pembuatan Tanda terima penyerahan</li> <li>Laporan penyerahan surat ijin</li> <li>Evaluasi penyerahan surat ijin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengaduan</li> <li>Klasifikasi pengaduan</li> <li>Analisis pengaduan</li> <li>Laporan pengaduan</li> </ul>

Gambar 3. Value Chain Dinas Perijinan

### 3.4 Arsitektur Teknologi

Tujuan dari pembuatan arsitektur teknologi adalah untuk mendefinisikan bermacam-macam teknologi utama yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan bagi aplikasi yang akan mengelola data. Teknologi arsitektur bukan merupakan analisis kebutuhan yang detail atau perancangan jaringan komputerisasi *enterprise* dan perangkat lunak. Arsitektur *Enterprise* mendefinisikan bermacam-macam teknologi – mengacu pada platform- yang akan mendukung bisnis dengan lingkungan pertukaran data. Arsitektur teknologi berelasi pada sudut pandang Pemilik (baris kedua) dari jaringan kolom Frame Work Zahman untuk Arsitektur Sistem Informasi.

### 4. KESIMPULAN

Cetak biru yang dihasilkan dengan Perencanaan Arsitektur Enterprise diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi. Sistem Informasi yang dibangun diharapkan dapat *align*, *support* dan *fit* dengan *enterprise* yang dalam hal ini adalah Dinas Perijinan sebagai penyelenggara PTSP dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan.

Budaya organisasi, dan policy merupakan bahan penelitian lanjutan dalam melakukan implementasi.

### PUSTAKA

- [1] Cook, Melissa A. (1996), *Building Enterprise Information Architectures: Reengineering Information Systems*, Prentice-Hall PTR.
- [2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (2006), *Potret Penyelenggaraan dan arah Pengembangan Pelayanan Perijinan di Jawa Barat*.
- [3] Federal Chief Information Officer (CIO) Council (2001), *A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture versi 1.0*, 2001.
- [4] IBM (1981), *Business System Planning – Information Systems Planning Guide*, International Business Machines Corporation.
- [5] *Jenis-jenis perijinan dan waktu penyelesaian sesuai dengan ISO 9001: 2000*, [www.sidoarjo.go.id](http://www.sidoarjo.go.id) diakses tanggal 6/10/2006.
- [6] *Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai PPTSP*, [Jabar.go.id](http://Jabar.go.id)
- [7] *Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Jembrana*, [www.bkksi.or.id](http://www.bkksi.or.id) diakses tanggal 6/10/2006
- [8] *Pelayanan Satu Pintu Plus di Kabupaten Solok*, [www.bkksi.or.id](http://www.bkksi.or.id) diakses tanggal 6/10/2006
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- [11] *Perencanaan Arsitektur Enterprise Di STT Telkom*, Paulus, 2004.
- [12] Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pelayanan Publik, Draft VIII 18-2-2005.
- [13] Ruth Malan, Dana Bredemeyer, Raj Krishnan and Aaron Lafrenz, *Enterprise Architecture as Business Capabilities Architecture*, Bredemeyer Consulting.
- [14] Spewak, Steven H., Hill, Steven C. (1992), *Enterprise Architecture Planning: Developing Blue Print for Data, Application, and Techonologi*, Jhon Willey&Sons.
- [15] Wantah Fajar (2006), *Perencanaan Arsitektur Enterprise untuk strategi Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Studi Kasus: PT. Medco Methanol Bunyu*, Institut Teknologi Bandung.
- [16] [www.jabar.go.id](http://www.jabar.go.id) diakses tanggal 20 Januari 2007.